

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen perubahan perencanaan tahunan Kabupaten sebagai landasan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025.

- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pasal Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA,



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19750222 199311 1 001

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN KEPUTUASAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen perubahan Renja PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun 2025;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan triwulan II tahun 2025.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan: sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD dan penyusunan perubahan RKA PD tahun 2025.
- c. Arah Pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan perubahan Renja PD sesuai ketentuan pasal Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Keputusan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA,



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19750222 199311 1 001

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen perubahan perencanaan tahunan Kabupaten sebagai landasan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan perubahan tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Pemerintah Daerah sebagai Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2025.
- Bagi Perangkat Daerah sebagai Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025.

- b. Arah pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pasal Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA,



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19750222 199311 1 001

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN KEPUTUASAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen perubahan Renja PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun 2025;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan triwulan II tahun 2025.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan: sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD dan penyusunan perubahan RKA PD tahun 2025.
- c. Arah Pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan perubahan Renja PD sesuai ketentuan pasal Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Keputusan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA,



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19750222 199311 1 001

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
 BUPATI GUNUNGKIDUL
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR... TAHUN...
 TENTANG
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah serta acuan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sehingga perlu perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Pasal 5

Dalam hal terdapat Perubahan RKPD Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN... NOMOR...